	- 1 (A) - 1 (A			
	NO. SOP	500.12.6.5/127/DISKOMINFO		
	TGL PEMBUATAN	15 OKTOBER 2025		
	TGL REVISI	-		
₹	TGL EFEKTIF	15 OKTOBER 2025		
	DISAHKAN OLEH PPID UTAMA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN				
	W.W. 202	RATNASARI N. TURUNGKU, SKM, MPH Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19700803 198912 2 001		
	NAMA SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELA	LIFIKASI PELAKSANA		
1. Undang – Undang Nomor 14	1. Memiliki pengetahuan dasar Peraturan Perundang -			
Tahun 2008 tentang		it Pelayanan Informasi Publik.		
Keterbukaan Informasi Publik;	Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan			
2. Peraturan Pemerintah Nomor	maupun tulisan.			
61 tahun 2010 tentang	3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.			
Pelaksanaan Undang – Undang	4. Memiliki kemampuan Kerjasama tim.			
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		erasikan peralatan komputer dengan		
3. Peraturan Menteri Dalam	baik.			
Negeri No. 3 Tahun 2017	Juni.			
tentang Pedoman Pengelolaan				
Pelayanan Informasi dan				
Dokumentasi Kementerian				
Dalam Negeri dan Pemerintah				
Daerah;				
4. Peraturan Komisi Informasi				
Nomor 1 Tahun 2021 tentang				
Standar Layanan Informasi Publik;				
5. Peraturan Menteri Komunikasi				
dan Informatika Republik				
Indonesia Nomor 4 Tahun 2024				
tentang Penyelenggaraan	Į.			
Urusan Pemerintahan				
Konkuren Bidang Komunikasi				
dan Informatika;				
6. Peraturan Bupati Banggai				
Kepulauan Nomor 3 Tahun				
2024 tentang Pedoman				
Pengelolaan Pelayanan				
Informasi dan Dokumentasi.	DDD 47 45 17 15 15			
KETERIKATAN	PERALATAN/PERL	ENGKAPAN		
1. SOP Pelayanan Permohonan	1. Komputer.			
Informasi Publik.	2. Printer.			
2. SOP Penyusunan Daftar	3. Alat tulis kantor.			
Informasi Publik.	4. Jaringan Interne	et.		
	5. File Organizer.			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN			
Apabila SOP ini tidak	Disimpan dalam ben	tuk hardcopy dan softcopy dan dokumen		
dilaksanakan, maka pelayanan	kegiatan.			
informasi publik akan	District Control of the Control of t			
terganggu dan berpotensi				
menimbulkan masalah hukum.				
moninguman masalan nakulii.	L			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pembantu diikuti oleh semua anggota 4 Kebijakan Atasan PPID	3 Rapat Koordinasi PPID	1 Menyiapkan Data Dan Informasi Pemutakhiran Daftar Informasi 2 Menerima Daftar Informasi Publik	NO KEGIATAN
an PPID	asi PPID uti oleh	ata Dan Itakhiran Si ar ar	
			BIDANG DAI PELAYANAN INFO
			PELAKSANA DAFTAR INFORMASI TIM PPID
			PID ATASAN PPID
			BIDANG PENDOKUMENTASIAN & ARSIP
Publik Dokumen Pendukung	Surat Undangan Rapat, Dokumen pendukung dan Daftar Informasi	Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	MUT KELENGKAPAN
7 hari	7 hari	7 hari 1 hari	MUTU BAKU WAKTU
Daftar Informasi	Hasil Keputusan Rapat Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID		OUTPUT